

# Penelitian tentang Adat Harus Dilakukan

JAKARTA - Posisi hukum adat dalam kehidupan nasional kembali menjadi perhatian sejumlah peneliti asing. Dalam sebuah diskusi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, Selasa (23/3), sejumlah peneliti Jepang dan Indonesia mengemukakan, hukum adat merupakan salah satu hukum yang bisa menjadi solusi ambruknya kewibawaan hukum nasional.

Namun pada saat yang sama para peneliti Jepang mengingatkan, penelitian tentang hukum adat harus terus dilakukan karena hukum adat tidak bersifat statis. "Saya berpendapat, adat adalah sesuatu yang dinamis. Adat itu berubah dan kajian ilmiah tentang adat di Indonesia harus bertumpu pada kesadaran bahwa adat itu terus berubah. Adat yang kita kenal sekarang berbeda dengan adat masa lalu," kata peneliti dari Jepang, Takashi Sugishima.

Takashi tidak menggunakan kata hukum ketika memaparkan konsepnya tentang adat di wilayah Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam pandangannya, adat mengandung makna hukum atau aturan lepas dari persoalan adat itu bersifat tertulis atau lisan.

Guru Besar Program Studi Asia dan Afrika Universitas Kyoto Jepang tersebut memaparkan, adat Ende dan juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia kehilangan maknanya pada masa penjajahan Belanda dan pemerintahan Orde Baru. Belanda dan Orde Baru tidak memberikan peluang bagi pemberlakuan dan pemberdayaan adat.

LIPI bekerja sama dengan Universitas Kyoto memberikan perhatian besar pada kajian kehidupan adat di Indonesia. Dalam diskusi terbatas kemarin, terlihat betapa semangatnya para peneliti asal Jepang memaparkan hasil penelitiannya.

Peneliti asal Jepang, Hideharu Umeda mendapat sambutan hangat usai memaparkan hasil penelitiannya tentang aspek religius dalam pementasan wayang Bali. Hideharu mengungkapkan adanya perdebatan di kalangan pemuka agama di Bali tentang peran wayang Bali.

Berbeda dengan para pe-neliti yang biasanya mengkritik peran pemerintah dalam masalah adat, Shato Fukuoka peneliti adat Sunda memberikan nilai positif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemda Jawa Barat (Jabar). Menurutnya, Disbudpar di era Otonomi Daerah sekarang terbukti mampu merangkul para budayawan Sunda.

Disbudpar Jabar terlihat secara aktif memberikan ruang bagi budayawan setempat untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Pandangan para budayawan tersebut dijadikan acuan pejabat setempat dalam menentukan program kerjanya.

Pandangan peneliti tersebut disanggah peneliti LIPI, Ninuk Kledan yang mengingatkan, perdebatan tentang wilayah kebudayaan Sunda masih berlangsung hingga kini. Ninuk juga mengingatkan, lepas dari anggapan bahwa adat Sunda tidak mencakup adat di wilayah pesisir Cirebon, Disbubpar terbukti tidak memperhatikan budayawan asal Cirebon. "Cirebon masih termasuk wilayah Jabar. Tetapi kenyataan membuktikan Disbubpar Jabar tidak memperhatikan pandangan pada budayawan asal Cirebon," tegasnya.

Shato Fukuoka mengakui, dirinya tidak terlalu banyak meneliti soal peran serta budayawan asal Cirebon dalam konteks kinerja Disbubpar Jabar. Ia malah mengungkapkan kekagumannya pada budayawan Ajip Rosidi yang berhasil menggelar Konperensi Internasional Budaya Sunda pada 2001.

Menurutnya, konperensi tersebut telah berhasil merangsang pemikiran ulang tentang posisi adat dalam konteks kehidupan kebangsaan Indonesia. Ajip yang mendirikan Yayasan Rancage terbukti mampu memberikan penghargaan bukan hanya pada budayawan Sunda tapi juga budayawan Jawa. (A-14)

---

Last modified: 24/3/04